



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

Kebijakan Fiskal Pemerintah, Layanan Pajak Daring dan Kepatuhan Persepsian Wajib Pajak Pribadi di Kota Samarinda

Praja Hadi Saputra^{1*}, Hamid Bone² dan Yulia Tri Kusumawati³

¹Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Departemen Manajemen, email: praja.hs@umkt.ac.id

²Universitas Mulawarman, Departemen Akuntansi, email: hamid.bone@feb.unmul.ac.id

³Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Departemen Manajemen, email: ytk716@umkt.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kebijakan fiskal pemerintah berupa program sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak serta layanan pajak daring terhadap persepsi kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi. Metode penelitian survei diadopsi dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data melalui kuesioner. Pemilihan sampel penelitian dilakukan secara non probabilitas melalui teknik penyampelan simple-random. 104 respon dari wajib pajak pribadi di KPP Pratama Kota Samarinda dikumpulkan dan diolah menggunakan perangkat lunak statistik SPSS 20. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, penelitian ini menemukan bahwa seluruh kebijakan fiskal yang diobservasi serta layanan pajak daring dapat mempengaruhi kepatuhan persepsian wajib pajak pribadi untuk membayar pajak mereka. Temuan ini menjadi perluasan bukti empiris bahwa untuk meningkatkan persepsi kepatuhan pembayaran pajak, pemerintah perlu merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan fiskal yang relevan dan menguntungkan bagi wajib pajak. Selain itu, peningkatan mutu pelayanan pajak berbasis daring juga menjadi tumpuan perhatian untuk dikembangkan secara praktis oleh pemerintah.

Kata kunci: sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, layanan pajak daring, kepatuhan pajak

Abstract

This study aims to empirically examine the influence of government fiscal policy through sunset policy, tax amnesty, tax sanctions, and online tax services on private taxpayers' perception of tax payment compliance. This study adopted a survey method to collect data through questionnaires. Research samples are selected on a non-probability basis through the simple-random sampling technique. One hundred four responses from personal taxpayers registered with KPP Pratama Samarinda were collected and processed using SPSS 20 statistics software. Based on the multiple linear regression analysis results, this study indicates that all observed fiscal policies and available online tax services may affect the compliance of personal taxpayers' perceptions of paying their taxes. This finding extends empirical evidence that to improve the perception of tax payment compliance, governments need to formulate and implement fiscal policies that are relevant and beneficial to the taxpayer. In addition, improving the quality of online-based tax services is also a focus of attention to be developed practically by the government.

Keywords: sunset policy, tax amnesty, tax sanctions, online services, tax compliance

1. Pendahuluan

Sebagai negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya yang variatif, Indonesia secara global dilabeli sebagai negara yang unggul dengan berbagai sumber pendapatannya. Pendapatan nasional Indonesia umumnya terbagi dalam dua kategori yaitu pendapatan dalam negeri dan pendapatan mancanegara. Salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang dimiliki oleh Indonesia adalah pendapatan yang bersumber dari iuran masyarakat yang disebut pajak [1]. Dalam realisasinya, pendapatan negara dalam bentuk pajak tersebut tidak lepas dari berbagai macam persoalan. Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia adalah kurangnya kesadaran mereka untuk membayar pajak sehingga tidak sedikit dari mereka yang akhirnya berurusan dengan hukum karena tidak taat membayar pajak baik secara tepat waktu atau melakukan penghindaran pajak [2]. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk menunaikan kewajiban pajak di Indonesia tergolong rendah. Kesimpulan tersebut didasari oleh data realisasi pajak khususnya PPh 21. Sebagai contoh, pada tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Laporan APBN bulan Mei tahun 2020 oleh Kementerian Keuangan RI menunjukkan realisasi penerimaan pajak PPh 21 menunjukkan angka peningkatan yang tidak terlalu signifikan dari tahun 2019 yaitu hanya sebesar 4,12% [3]. Data tersebut juga dipertegas melalui angka penerimaan pajak keseluruhan di tahun 2020 (Rp 434,33 triliun) yang lebih rendah 0,86% dari tahun 2019 (Rp438,09 triliun). Gambar 1 merupakan ilustrasi realisasi penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir. terlihat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2015 hingga 2020 secara berurutan adalah 8,2%, 3,6%, 4,6%, 13,0%, 1,8% dan -5,4%. Secara garis besar, rata-rata penerimaan pajak dalam periode tersebut cenderung “menukik”.



Sumber: Kementerian Keuangan RI (2020)

Gambar 1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Indonesia (2015-2020)

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut. Nugraheni dan Purwanto [4] mengungkapkan banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Mengingat begitu pentingnya pajak bagi negara, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan kebijakan strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak [5]. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya sistem penilaian mandiri (SAS). *Self-assessment System* mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pada kantor pajak di daerah masing-masing.

Kebijakan lain yang pernah diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah

melalui *Sunset Policy* pada tahun 2008 yang sifatnya sukarela. *Sunset policy* 2008 merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki laporan surat pemberitahuan tahunan atas pajak penghasilannya untuk tahun 2007 dan tahun sebelumnya. Optimisme keberhasilan *Sunset policy* tersebut tercermin dengan adanya contoh konkrit kebijakan serupa di Afrika Selatan yang mana dalam pelaksanaannya mencapai kesuksesan dengan berhasil menghimpun pajak sekitar 50 ribu wajib pajak [6]. Sebagai suksesor *Sunset Policy* 2008, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali melaksanakan *Sunset Policy* jilid 2 yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tanggal 13 Februari 2015. Setelah itu, dalam lima tahun terakhir, berbagai upaya dan kebijakan pun bermunculan seperti *tax amnesty* dan penerapan sanksi pajak yang dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan dimasa yang akan datang serta memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke administrasi perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor kebijakan fiskal pemerintah dan layanan pajak daring yang dipandang memiliki kemampuan untuk menstimulasi persepsi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menguji bagaimana persepsi wajib pajak tentang penerapan kebijakan fiskal dan layanan daring sehingga berdampak pada kepatuhan persepsian pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini penting dalam bidang perpajakan karena dalam observasinya, penelitian ini mengkombinasikan faktor kebijakan dan pelayanan pajak yang dapat mempengaruhi persepsi patuh bagi wajib pajak. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak berpersepsi patuh akan kewajiban mereka membayar pajak melalui dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah dan layanan pajak secara daring. Secara praktis, penelitian ini menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan fiskal dan pelayanan perpajakan di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Kebijakan *Sunset Policy* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kebijakan yang pernah diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah *Sunset Policy* 2008. Kebijakan ini secara sukarela mampu meningkatkan kesadaran pajak masyarakat serta berdampak pada kenaikan penerimaan pajak dari tahun 2007 dan tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak kembali menerapkan *Sunset Policy* kedua pada tahun 2015 sebagai seri kesuksesan kebijakan fiskal untuk menghimpun pajak dari masyarakat. Kebijakan *sunset policy* ini tidak dilakukan setiap tahun, sehingga efek dari kebijakan tersebut diyakini mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di tahun mendatang. Penelitian Pakpahan [7] menerangkan bahwa *sunset policy* berpengaruh positif terhadap faktor-faktor keinginan wajib pajak di Kota Medan untuk membayar pajak. Namun, penelitian lain pada wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan menunjukkan hasil negatif dan tidak signifikan untuk pengaruh *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak [8]. Meskipun demikian, peranan *sunset policy* ini cenderung dipandang sebagai salah satu kebijakan fiskal yang sukses dalam menghimpun pajak dari masyarakat karena sampai dilaksanakan hingga dua kali di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Persepsi wajib pajak tentang kebijakan fiskal *sunset policy* berpengaruh terhadap kepatuhan persepsian wajib pajak pribadi di kota Samarinda.

2.2 Kebijakan *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kebijakan fiskal *Tax amnesty* dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan dimasa yang akan datang dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke administrasi perpajakan. Bayer *et al.* [9] mengungkapkan bahwa program fiskal seperti *tax amnesty* dipercaya mampu memberikan kesempatan kepada para penunggak pajak untuk membayar semua atau sebagian dari pajak tertunggak tanpa dikenakan tuntutan atau hukuman. Umumnya, pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, mendorong repatriasi modal atau aset, dan transisi ke

sistem perpajakan yang baru. Ibrahim [10] mengungkapkan bahwa *tax amnesty* merupakan kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, sebagai pertukaran atas pengampunan dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum pidana. Dana dari pajak yang dikumpulkan tentunya berasal dari wajib pajak yang memiliki persepsi bahwa dengan mengikuti program *tax amnesty* mereka akan diuntungkan. Untuk itu, penelitian ini mengajukan hipotesis terkait kebijakan *tax amnesty* yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut:

H₂: Persepsi wajib pajak tentang kebijakan fiskal *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan persepsian wajib pajak pribadi di kota Samarinda

2.3 Kebijakan Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada beberapa macam sanksi administratif yaitu (1) Sanksi administrasi berupa denda, (2) sanksi administrasi berupa bunga, dan (3) sanksi administrasi berupa kenaikan tarif. Penelitian terdahulu [11] menunjukkan bahwa adanya sanksi yang diatur oleh pemerintah bagi pelanggar pajak akan mempengaruhi para wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Bukti yang sama juga dihasilkan dalam penelitian Santi [12] yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan para wajib pajak. Sebagai kesimpulan, pemerintah menggunakan sanksi perpajakan dan menerapkannya untuk tujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak karena para wajib pajak cenderung takut dan menghindari sanksi yang akan diberikan ketika kewajibannya tidak terpenuhi. Adapun hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Persepsi wajib pajak tentang kebijakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan persepsian wajib pajak pribadi di kota Samarinda

2.4 Pelayanan Pajak Daring dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pentingnya pelayanan untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak merupakan sasaran strategi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan adanya pelayanan yang baik akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Santi [13] yang melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah kota Malang dan memperoleh bukti empiris bahwa kualitas *e-tax* berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan. Temuan mereka juga mengindikasikan bahwa *e-tax* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Fasilitas layanan daring seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-faktur* merupakan upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Husnurrosyidah [14] mengemukakan bahwa sistem *e-filing*, *e-billing*, *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada BMT Kudus. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Sudrajat dan Ompusunggu [15] yang menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di kantor wilayah DJP Jakarta Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan hipotesis tentang penerapan pelayanan daring atau *online* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

H₄: Persepsi wajib pajak tentang layanan pajak daring berpengaruh terhadap kepatuhan persepsian wajib pajak pribadi di kota Samarinda

3. Metode Penelitian

Penelitian ini didesain dengan tujuan untuk mencari bukti dari pengaruh kebijakan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Dengan kata lain, peneliti ingin melakukan pengamatan dan penjelasan mendalam serta menguji pengaruh atau hubungan antara variabel-variabel yang dihipotesiskan sehingga pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanatori. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survei untuk memperoleh data primer langsung dari responden. Survei yang dilakukan adalah melalui *self-administered survey* dalam bentuk kuesioner. Cooper dan Schindler [16] menyebutkan bahwa teknik survei merupakan teknik penelitian yang mengumpulkan data melalui penggunaan

angket yang bertujuan untuk memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari sumbernya (data primer). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda. Mengingat banyaknya jumlah wajib pajak di Kota Samarinda, maka penelitian ini menentukan sampel yang relevan dikarenakan keterbatasan waktu serta biaya sehingga penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Teknik ini merupakan pengambilan sampel secara probabilitas karena semua elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, hanya saja teknik acak ini lebih sederhana karena populasi hanya berada dalam satu wilayah. Pemilihan lokasi penelitian yaitu di Kota Samarinda (KPP Pratama Samarinda) oleh peneliti karena diantara kabupaten dan kota yang berada di Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda merupakan kota dengan jumlah wajib pajak yang terbesar. Hasil penyebaran kuesioner terkumpul sebanyak 142 respon dari 200 kuesioner yang disebar. Namun setelah melakukan analisis terhadap respon dengan menyesuaikan standar kecukupan maka diperoleh 104 respon yang layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut sehingga tingkat respon adalah sebesar 52,00%. Menurut Gudono [17], *response rate* dalam penelitian ilmu sosial di Indonesia sudah dikatakan tinggi ketika memperoleh tingkat di atas atau sama dengan 35%. Data dari kuesioner yang disebar diolah berdasarkan Skala Likert dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012). Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Adapun variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Variabel dependen: Kepatuhan persepsian wajib pajak (KP - 6 item)
2. Variabel independent: Kebijakan *sunset policy* (SP - 8 item)
Kebijakan *tax amnesty* (TA - 6 item)
Kebijakan sanksi pajak (SPK - 8 item)
Layanan Pajak Daring (LPD - 10 item)

Pengujian terhadap data yang dikumpulkan melalui kuesioner penelitian yang disebar langsung ke sumber data (data primer) dilakukan melalui beberapa tahapan pengujian. Beberapa pengujian dilakukan untuk memperoleh keabsahan terhadap data yang ada serta relevansi data untuk analisis lebih lanjut serta pengujian hipotesis. Tahapan pengujian keabsahan data dilakukan mulai dari uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik. Uji asumsi dasar diproksikan oleh uji normalitas terhadap data penelitian. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas yang dilakukan adalah menggunakan *One Sample Kolmogrov-Smirnov test* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Selanjutnya uji asumsi klasik yang menggunakan uji multikoleniaritas. Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan program SPSS 20. Analisis regresi linier berganda adalah analisis terhadap hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Statistik Deskriptif Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertempat di kota Samarinda yang berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda. Pemilihan lokasi tersebut dianggap sudah representatif mengingat data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah persepsi mengenai kebijakan dan layanan pajak sehingga peneliti bersumsi bahwa wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak akan lebih relevan untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 1 dapat memberikan gambaran bahwa karakteristik umum dari sampel yang digunakan dalam penelitian dan rincian batasan minimum

dan maksimum serta mean dari respon yang diberikan oleh responden untuk tiap butir instrument yang mengukur konstruk penelitian. Pada tabel 1, diindikasikan bahwa rata-rata responden memberikan jawaban untuk seluruh item pada masing-masing indicator berada di angka 20an dengan batasan terendah adalah 7 dan batasan tertinggi adalah 42.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

| | N | Min. | Max. | Mean | Std. Deviation |
|--------------------------------|-----|------|------|-------|----------------|
| Kebijakan <i>sunset policy</i> | 104 | 9 | 27 | 21.53 | 5.477 |
| Kebijakan <i>tax amnesty</i> | 104 | 7 | 30 | 25.40 | 4.320 |
| Kebijakan sanksi pajak | 104 | 8 | 27 | 24.18 | 4.198 |
| Layanan Pajak Daring | 104 | 9 | 42 | 20.86 | 3.286 |
| Kepatuhan wajib pajak | 104 | 7 | 30 | 23.69 | 4.442 |
| Valid N (listwise) | 104 | | | | |

Sumber: Data olahan peneliti (2021)

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Uji validitas data untuk membuktikan bahwa instrumen penelitian dapat secara valid digunakan untuk mengukur konstruk. Penelitian ini menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* sebagai alat analisis validitas tiap item konstruk penelitian. Analisis dilakukan dengan melihat nilai *r* dan signifikansi korelasi antara skor tiap item pengukuran konstruk dengan skor totalnya. Jika nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel, maka item yang digunakan dapat dikatakan memenuhi syarat validitas. Selain itu, uji validitas juga dilakukan dengan melihat indikasi nilai signifikansi yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Hasil uji validitas untuk item semua konstruk penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

| Instrumen | | Validitas | | | Reliabilitas | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| Variabel | Items | Pearson Correlation (r-hitung) | r-tabel (df=104-2) | Sig. (0.05) | Keterangan | Cronbach's alpha |
| Kebijakan <i>Sunset Policy</i> (SP) | 8 items | All items >0.70 | 0.1927 | 0.00 | Valid | 0.540 (Reliabel) |
| Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (TA) | 6 items | All items >0.50 | 0.1927 | 0.00 | Valid | 0.710 (Reliabel) |
| Kebijakan Sanksi Pajak (SPK) | 8 items | All items >0.50 | 0.1927 | 0.00 | Valid | 0.701 (Reliabel) |
| Layanan Pajak Daring (LPD) | 10 items | All items >0.70 | 0.1927 | 0.00 | Valid | 0.682 (Reliabel) |
| Kepatuhan Persiap Wajib Pajak (KP) | 6 items | All items >0.70 | 0.1927 | 0.00 | Valid | 0.889 (Reliabel) |

Sumber: Output SPSS 20 olahan data peneliti (2021)

Nilai dari uji validitas item-item instrumen penelitian yang menunjukkan kriteria terpenuhi untuk dikatakan valid. Terlihat bahwa seluruh nilai *r*-hitung (*Pearson Correlation*) untuk tiap item adalah lebih besar dari *r*-tabel yaitu 0,1927 (df=104-2). Begitu juga nilai signifikansi masing-masing item yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan/pertanyaan pada instrumen penelitian untuk seluruh variabel adalah memenuhi validitas penelitian. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis skala reliabilitas dengan melihat nilai *Cronbach's alpha* yang diperoleh masing-masing konstruk penelitian. *Rule of thumb* dari syarat reliabilitas dalam penelitian ini adalah merujuk pada panduan reliabilitas ilmu sosial yang mensyaratkan nilai >0,60 agar memenuhi reliabilitas penelitian. Hasil uji reliabilitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 di atas yang mengindikasikan bahwa seluruh nilai *Cronbach's alpha* masing-

masing variabel penelitian berada di atas 0,50 atau telah memenuhi *role of thumb* sehingga dapat disimpulkan memenuhi reliabilitas penelitian.

4.3 Hasil Uji Normalitas dan Multikoleniaritas Penelitian

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian, penelitian ini juga melakukan pengujian terhadap kualitas data yang diperoleh melalui pendekatan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang dioperasikan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan multikoleniaritas. Analisis normalitas terhadap data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis *Kolmogorov-Smirnov*. Indikator normalitas pada analisis tersebut adalah jika nilai yang dihasilkan lebih besar dari batas signifikansi penelitian yaitu 0,05 sehingga data dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas penelitian. Berdasarkan *output* SPSS 20 hasil pengujian normalitas data penelitian ini, nilai signifikansi hasil analisis *Kolmogorov-Smirnov* secara keseluruhan berada di atas 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa seluruh data untuk masing-masing variabel penelitian adalah terdistribusi normal. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa data penelitian ini telah memenuhi persyaratan asumsi normalitas dan data penelitian dikatakan berkualitas normal. Untuk uji multikoleniaritas data penelitian ini diketahui bahwa nilai *tolerance* dari semua variabel independen penelitian berada di atas 0.10 serta nilai VIF yang berada dibawah 10. Hal ini menyimpulkan bahwa dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah multikoleniaritas sehingga layak untuk digunakan sebagai model regresi penelitian. Dengan kata lain, seluruh konstruk yang masuk dalam model regresi penelitian telah memenuhi syarat uji asumsi multikoleniaritas penelitian.

4.4 Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Seluruh hipotesis penelitian (H1, H2, H3, dan H4) diuji melalui metode statistik analisis regresi linear berganda. Seluruh hipotesis penelitian disusun untuk menguji pengaruh dari kebijakan-kebijakan fiskal pemerintah dan layanan pajak daring terhadap kepatuhan persepsian para wajib pajak pribadi di KPP Pratama Kota Samarinda. Adapun persamaan regresi linear berganda yang dimodelkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KP = a + b(SP) + b(TA) + b(SPK) + b(LPD) + e \quad (1)$$

Keterangan:

| | |
|-----|------------------------------------|
| KP | = kepatuhan persepsian wajib pajak |
| a | = konstanta |
| b | = koefisien |
| SP | = kebijakan <i>sunset policy</i> |
| TA | = kebijakan <i>tax amnesty</i> |
| SPK | = kebijakan sanksi pajak |
| LPD | = layanan pajak daring |
| e | = <i>error</i> |

Prosedur pengujian hipotesis penelitian dan kualitas hubungan terdiri dari beberapa analisis. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang diobservasi terhadap kepatuhan persepsian para wajib pajak pribadi di kota Samarinda. Dengan kata lain, pengujian ini ingin membuktikan status keterdukungan terhadap hipotesis yang diajukan. Pengujian yang dilakukan seperti uji determinasi, uji parsial (uji t), dan (uji f). Pengujian yang pertama adalah uji koefisien dieterminasi (R^2) model penelitian. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kualitas atau level menjelaskan dari variabel-variabel independen dan bertujuan untuk mengetahui tingkat prediksi atau keterjelasan variabel dependen oleh variabel-variabel independent penelitian. Ghazali [18] mengungkapkan bahwa uji koefisien determinasi dilakukan untuk menilai seberapa dalam kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada penelitian ini, uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat bagaimana variasi dari variabel kebijakan fiskal (*sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak) dan layanan pajak daring dalam menjelaskan kepatuhan persepsian wajib pajak. Hasil uji koefisien determinasi (*R-square*) pada penelitian ini

menunjukkan nilai *R-square* sebesar 0,403 yang mengindikasikan bahwa secara statistik variabel kepatuhan persepsian wajib pajak mampu dijelaskan atau diprediksi sebesar 40,3% oleh variasi dari variabel-variabel independen dalam model penelitian. Untuk 59,7% lainnya, dijelaskan oleh variabel-variabel diluar model observasian dalam penelitian. Pengujian selanjutnya adalah uji F pada regresi linear berganda. Uji ini dilakukan untuk melihat variasi secara bersamaan (simultan) dari variabel-variabel predictor/independent dalam mempengaruhi variabel independent. *Role of thumb* pada uji F ini dilihat dari nilai yang ditunjukkan oleh *f*-hitung (positif/negatif) dan tingkat signifikansi yang berada dibawah nilai yang ditentukan yaitu 0,05 (5%). Hasil uji F penelitian ini disajikan pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji F Regresi Linear Berganda

| Model | | Sum of Squares | df | Mean squares | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|-----|--------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 521.262 | 4 | 151.892 | 10.480 | .000 ^b |
| | Residual | 1442.018 | 107 | 14.344 | | |
| | Total | 1926.480 | 110 | | | |

a. Dependent variable: KP

b. Predictors: (constant), SP, TA, SPK, LPD

Sumber: Output SPSS 20 olahan data peneliti (2021)

Hasil yang ditunjukkan pada tabel 3 di atas menjelaskan mengenai hasil uji F secara simultan pada model regresi penelitian. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa nilai F hitung yang ditunjukkan adalah positif yaitu sebesar 10,481. Hal ini mengindikasikan pengaruh seluruh variabel-variabel dependen penelitian secara bersamaan memiliki pengaruh yang positif. Selain itu, nilai signifikansi yang dihasilkan berada pada nilai $<0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel-variabel independen penelitian ini secara simultan mampu mempengaruhi variabel kepatuhan pajak para wajib pajak di kota Samarinda.

Tabel 4. Hasil Uji T Regresi Linear Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficient | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 10.860 | 4.745 | | 2.671 | .000 |
| | SP | .385 | .302 | .287 | 2.143 | .001 |
| | TA | .252 | .112 | .139 | 3.652 | .000 |
| | SPK | .180 | .084 | .192 | 3.170 | .000 |
| | LPD | .375 | .142 | .306 | 2.015 | .001 |

a. Dependent variable: KP

Sumber: Output SPSS 20 olahan data peneliti (2021)

Pengujian terakhir adalah uji T penelitian yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap keterdukungan hipotesis penelitian. Dalam regresi linear berganda, uji T ini biasa disebut juga dengan uji parsial yaitu penilaian terhadap masing-masing variabel predictor/independent dalam mempengaruhi/berhubungan dengan variabel dependen. *Role of thumb* dalam uji T penelitian adalah dengan melihat nilai t hitung yang dihasilkan pada tabel uji t regresi berganda yaitu apakah angka menunjukkan positif atau negatif yang disesuaikan dengan hipotesis penelitian yang dirumuskan. Selain itu, pada uji t juga dilihat nilai signifikansi yang ada ($<0,05$). Pada tabel 4 di atas, ditunjukkan hasil dari uji t dalam regresi berganda yang merupakan uji hipotesis penelitian. Dapat dilihat bahwa angka yang ditunjukkan untuk nilai t hitung seluruhnya menghasilkan nilai yang positif dan berada pada signifikansi $<0,05$. Hal ini menyimpulkan bahwa masing-masing pengaruh dari variabel prediktor (SP, TA, SPK, dan LPD) terhadap variabel dependen kepatuhan persepsian wajib pajak (KP) adalah positif dan signifikan. Hasil ini memberikan gambaran awal terkait keterdukungan hipotesis penelitian dan akan dibahas lebih rinci pada sesi pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, berdasarkan hasil

uji T pada tabel 4 di atas, persamaan regresi berganda yang dihasilkan berdasarkan luaran analisis adalah sebagai berikut:

$$KP = 10,860 + 0,385(SP) + 0,252(TA) + 0,180(SPK) + 0,375(LPD) + e \quad (2)$$

4.5 Pembahasan

Hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan telah merefleksikan hasil dari tujuan penelitian ini yang ingin melihat bagaimana variabel kebijakan dan layanan perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan pajak para wajib pajak di kota Samarinda. Hasil analisis memberikan indikasi bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian secara signifikan dan positif adalah terdukung. Pada hasil uji f secara simultan (Tabel 7) menunjukkan bahwa variabel Kebijakan *Sunset Policy* (X1), Kebijakan *Tax Amnesty* (X2), Sanksi Pajak (X3) dan Layanan Pajak Daring (X4) secara simultan dari variasi perubahannya dapat mempengaruhi Kepatuhan Persepsian Wajib Pajak (Y). Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai f hitung yang ditunjukkan. Pada tabel 7 menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 10,481 serta signifikan 0,000 (<0.05). Dengan kata lain, model regresi penelitian terbukti *adequate* untuk digunakan [18]. Untuk kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis, dapat dilihat pada tabel 8. Nilai di dalam tabel tersebut menunjukkan hasil uji parsial dari masing-masing variabel predictor penelitian terhadap variabel dependen. Dapat dilihat bahwa nilai t hitung untuk variabel Kebijakan *Sunset Policy* adalah sebesar 2,143 dan berada pada signifikansi dibawah 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 terdukung (hasil analisis positif dan signifikan). Begitu juga variabel Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak yang masing-masing menunjukkan nilai t hitung positif (3,562 dan 3,170) dan signifikan pada level dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 dan 3 penelitian terdukung. Selanjutnya, hasil uji t pada tabel 8 juga memberikan gambaran mengenai keterdukungannya terhadap hipotesis 4 penelitian. Dilihat pada tabel tersebut yang menunjukkan nilai t hitung untuk variabel Layanan Pajak Daring adalah sebesar 2,015 dan signifikan sebesar 0,001.

5. Kesimpulan dan Saran

Dengan mengobservasi faktor kebijakan pemerintah melalui program sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak serta faktor layanan pajak online, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peranan kebijakan dan layanan pajak tersebut dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang dimiliki oleh para wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda. Berdasarkan hasil yang telah diuraikan dalam bagian pembahasan, seluruh variabel observasi yang tergolong pada kebijakan dan layanan perpajakan yang disediakan oleh pemerintah dan diterapkan oleh salah satu kantor pelayanan pajak di Kota Samarinda mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki oleh para wajib pajak di Kota Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya evaluasi terhadap kebijakan dan layanan perpajakan karena memiliki peran yang krusial dalam mempengaruhi sikap wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban pajak mereka. Dengan menyediakan layanan pajak yang sesuai perkembangan teknologi saat ini akan lebih memudahkan para wajib pajak untuk melaporkan bahkan membayar tunggakan pajak mereka. Hal ini karena para wajib pajak merasa sangat terbantu dengan adanya layanan tersebut yang mampu memberikan kemudahan bagi mereka. Observasi terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini masih terbatas pada cakupannya dan belum mewakili semua kebijakan dan layanan perpajakan yang ada. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya, penelitian pengembangan dilakukan dengan melakukan observasi variabel lain yang relevan sehingga semakin memperluas referensi/literatur terkait sistem, kebijakan, serta layanan perpajakan yang mampu menstimulasi kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajaknya. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran yang dapat digunakan oleh para pemangku kebijakan khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengupayakan terciptanya pelayanan yang lebih mempermudah masyarakat atau wajib pajak dalam aktivitas perpajakan mereka. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang sudah ada hendaknya dievaluasi ketercapaiannya apakah sudah sesuai harapan dan tujuan atau masih perlu dilakukan perbaikan mengingat kebijakan perpajakan juga mampu mempengaruhi kepatuhan pajak para wajib pajak di Indonesia khususnya di Kota Samarinda

sesuai hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Y. Nanda, T. Arfan, and M. P. Zifi, "Tax Planning Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Suami Istri yang Memiliki Penghasilan Masing-Masing," *J. Akunt. Keuang. dan Bisnis*, vol. 10, no. 2, pp. 44–50, 2017.
- [2] P. H. Saputra, "Persepsi Mahasiswa dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan di Kota Samarinda," *J. Ilm. Akunt. Kesatuan*, vol. 9, no. 2, pp. 283–292, 2021, doi: 10.37641/jiakes.v9i2.790.
- [3] kementerian Keuangan, "APBN KITA Tahun 2020," 2020. [Online]. Available: <https://kemenkeu.go.id/apbnkita>.
- [4] A. D. Nugraheni and A. Purwanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi," *Diponegoro J. Account.*, vol. 4, pp. 1–14, 2015.
- [5] N. Wahyuni, P. Kurnia, and A. Faradisty, "Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Bangkinang)," *J. Akunt. Keuang. dan Bisnis*, vol. 13, no. 2, pp. 88–97, 2020.
- [6] O. Basuki, "Afrika Selatan Sukses Ampuni ro Ribu Wajib Pajak," *kompas.com*, 2008. [Online]. Available: <http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/14/14271383/afrika.selatan.sukses.ampuni.50.ribu.wajib.pajak>.
- [7] B. H. Pakpahan, "Pengaruh Sunset Policy Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia," Universitas Medan Area, 2011.
- [8] N. Ngadiman and D. Huslin, "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)," *J. Akunt.*, vol. 19, no. 2, p. 225, 2017, doi: 10.24912/ja.v19i2.96.
- [9] R. C. Bayer, H. Oberhofer, and H. Winner, "The occurrence of tax amnesties: Theory and evidence," *J. Public Econ.*, vol. 125, pp. 70–82, 2015, doi: 10.1016/j.jpubeco.2015.02.006.
- [10] M. Ibrahim, "Tax policy in Indonesian energy sectors: An Overview of Tax Amnesty Implementation," *Int. J. Energy Econ. Policy*, vol. 8, no. 4, pp. 234–236, 2018.
- [11] N. ketut Muliari and P. E. Setiawan, "Pengaruh Persepsi Tetang Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur," *J. Ilm. Akunt. dan Bisnis*, vol. 6, no. 1, pp. 1–23, 2011, doi: 10.33395/owner.v4i2.289.
- [12] A. N. Santi, "Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)," Universitas Diponegoro, 2012.
- [13] N. A. Santi, "Pengaruh Kualitas E-Tax Terhadap Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Atas Wajib Pajak Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)," *J. Mhs. Perpajak.*, vol. 6, no. 1, 2015.
- [14] H. Husnurrosyidah, "Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus," *J. Anal. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 1, no. 1, pp. 97–106, 2017, doi: 10.25139/jaap.v1i1.99.
- [15] A. Sudrajat and A. P. Ompusunggu, "Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak," *J. Ris. Akunt. Perpajak.*, vol. 2, no. 02, pp. 193–202, 2015, doi: 10.35838/jrap.v2i02.110.
- [16] D. Cooper and P. Schindler, *Business Research Methods*. US: McGraw-Hill US Higher Ed., 2013.
- [17] Gudono, *Analisis Data Multivariat*, Eds. 4. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2015.
- [18] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.